

Filsafat Gotong Royong di Era Global: Transformasi Filantropi Keagamaan menjadi Solidaritas Kewarganegaraan

Andri Fransiskus Gultom ^{a, 1*}

^a Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Indonesia

¹ andri.franz@unikama.ac.id*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 26 Oktober 2025;

Revised: 12 November 2025;

Accepted: 15 November 2025.

Kata-kata kunci:

Gotong Royong;

Filantropi Keagamaan;

Solidaritas Kewarganegaraan;

Pancasila;

Solidaritas Teo-Sivik.

: ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk merekonseptualisasi filsafat Gotong Royong sebagai jembatan antara praktik filantropi keagamaan dan solidaritas kewarganegaraan di tengah arus individualisme global. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi filosofis, penelitian ini membedah transformasi nilai-nilai altruisme religius menuju aksi sipil yang inklusif dalam bingkai Pancasila. Kebaruan penelitian ini terletak pada tawaran konsep "Solidaritas Teo-Sivik", di mana filantropi tidak lagi dipandang sekadar sebagai kewajiban teologis privat, melainkan sebagai instrumen politik kewarganegaraan yang memperkuat kohesi sosial di masyarakat multikultural. Hasil kajian menunjukkan bahwa digitalisasi filantropi keagamaan di Indonesia telah menggeser batas-batas eksklusivitas komunal menjadi gerakan kemanusiaan lintas iman yang berbasis pada keadilan sosial. Revitalisasi filosofis Gotong Royong, dalam penelitian ini krusial untuk mencegah segregasi sosial, sekaligus memosisikan Pancasila sebagai sistem etika global yang mampu mensinergikan identitas transenden dengan tanggung jawab imanen sebagai warga negara. Konsep ini memberikan kontribusi teoretis baru dalam studi kewarganegaraan pasca-sekular. Secara praktis, temuan ini menawarkan peta jalan bagi penguatan resiliensi nasional melalui sinkronisasi antara kebijakan publik dan energi spiritual di era global.

ABSTRACT

The Philosophy of Mutual Cooperation in the Global Era: Transforming Religious Philanthropy into Civic Solidarity. This research aims to reconceptualize the philosophy of Gotong Royong as a bridge between religious philanthropic practices and civic solidarity amidst the currents of global individualism. Employing a qualitative method with a philosophical phenomenological approach, this study dissects the transformation of religious altruistic values into inclusive civic action within the framework of Pancasila. The novelty of this research lies in the proposal of the "Theo-Civic Solidarity" concept, where philanthropy is no longer viewed merely as a private theological obligation but as an instrument of civic politics that strengthens social cohesion in a multicultural society. The findings indicate that the digitalization of religious philanthropy in Indonesia has shifted the boundaries of communal exclusivity toward interfaith humanitarian movements based on social justice. This study concludes that the philosophical revitalization of Gotong Royong is crucial to preventing social segregation while positioning Pancasila as a global ethical system capable of synergizing transcendent identity with immanent responsibility as citizens. This concept provides a new theoretical contribution to post-secular citizenship studies. Practically, these findings offer a roadmap for strengthening national resilience through synchronization between public policy and spiritual energy in the global era.

Copyright © 2025 (Andri Fransiskus Gultom). All Right Reserved

How to Cite : Gultom, A. F. (2025). Filsafat Gotong Royong di Era Global: Transformasi Filantropi Keagamaan menjadi Solidaritas Kewarganegaraan. *In Theos : Jurnal Pendidikan Dan Theologi*, 5(7), 285–293. <https://doi.org/10.56393/intheos.v5i7.4178>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Dinamika globalisasi cenderung menyeragamkan nilai-nilai kehidupan lewat arus materialisme dan individualisme (Yeganeh, 2024; Adiyani, & Khususyairi, 2025). Posisi filsafat lokal menjadi krusial sebagai jangkar identitas. Indonesia, melalui Pancasila, menawarkan ontologi Gotong Royong bukan sekadar sebagai aktivitas fisik bersama, melainkan sebagai praksis eksistensial yang menyatukan dimensi transenden dan imanen. Secara filosofis, Gotong Royong merupakan manifestasi dari relasi intersubjektivitas yang mengakui bahwa keberadaan "Aku" hanya mencapai kepenuhannya melalui pengakuan terhadap "Liyan" dalam bingkai ketuhanan dan kemanusiaan. Integrasi nilai ini menjadi antitesis terhadap krisis autentisitas yang melanda masyarakat modern akibat dekonstruksi ruang sosial oleh logika pasar (Asmaroini & Fitricahyani, 2024). Dengan demikian, reaktualisasi Pancasila dalam diskursus kewarganegaraan berfungsi untuk mengembalikan martabat manusia dari sekadar subjek ekonomi menjadi agen moral yang berakar pada kohesi spiritual (Santoso, 2023; Gultom, 2024).

Evolusi praktik filantropi keagamaan, dalam konteks masyarakat Indonesia yang religius, dorongan untuk membantu sesama secara historis berakar kuat pada ajaran teologis. Filantropi keagamaan, seperti zakat, persepuluhan, maupun *dāna*, telah lama menjadi mesin penggerak kesejahteraan sosial. Namun, dalam perkembangannya, filantropi ini seringkali terjebak dalam sekat-sekat eksklusivisme komunal yang membatasi jangkauan moralnya hanya pada batas-batas identitas agama tertentu, sehingga potensi transformatifnya bagi kebaikan publik yang lebih luas seringkali terhambat. Keterbatasan ini diperparah oleh munculnya filantropi digital yang meskipun efisien secara teknis, sering kali mengabaikan kedalaman relasi kemanusiaan yang inklusif demi popularitas algoritma semata (Hidayat & Sugianto, 2023). Oleh karena itu, diperlukan reorientasi nilai agar kedermawanan religius dapat bertransformasi menjadi modal sosial yang melampaui batas teologis menuju solidaritas kewarganegaraan yang universal (Nurhadi, 2024). Revitalisasi ini menjadi krusial untuk memastikan bahwa setiap kontribusi berbasis iman mampu memperkuat struktur keadilan distributif yang menjadi cita-cita luhur Pancasila (Wibowo et al., 2022).

Urgensi penelitian dalam arus global terletak pada perlunya merumuskan ulang relasi antara kesalehan privat dan tanggung jawab publik di era global yang penuh disrupsi. Ketika krisis kemanusiaan dan ketimpangan ekonomi menjadi persoalan lintas batas, filantropi keagamaan tidak lagi cukup hanya dikelola sebagai ritual kesalehan individu. Terdapat kebutuhan mendesak untuk mentransformasikan energi spiritual tersebut menjadi 'Solidaritas Kewarganegaraan' yang aktif dan inklusif, guna memperkuat ketahanan sosial nasional dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Fenomena ini menuntut adanya sintesis antara etika religius dan kesadaran sipil agar aksi kedermawanan tidak terjebak dalam fragmentasi identitas yang sempit (Rasyid & Fadli, 2023). Melalui pendekatan filsafat Pancasila, solidaritas tersebut dapat direkonstruksi sebagai bentuk loyalitas kepada kemanusiaan yang melampaui batas-batas komunal namun tetap berpijak pada nilai Ketuhanan (Fauzi & Handayani, 2024). Dengan demikian, penguatan dimensi publik dari iman akan menjadi fondasi bagi terciptanya keadilan sosial yang lebih resilien dalam menghadapi volatilitas tatanan global (Pratama, 2025).

Istilah solidaritas kewarganegaraan (*civic solidarity*) merupakan konsep kunci dalam filsafat politik yang menjelaskan ikatan antara anggota masyarakat dalam sebuah negara-bangsa. Istilah tersebut dari perspektif dari filsuf politik, pertama, Habermas (1996) melihat solidaritas kewarganegaraan sebagai "solidaritas antar orang asing." Dalam pandangannya, masyarakat modern tidak lagi dipersatukan oleh tradisi atau agama yang sama, melainkan oleh komitmen bersama terhadap prosedur demokrasi dan hak asasi manusia (Patriotisme Konstitusional). Solidaritas ini memungkinkan warga negara yang memiliki latar belakang berbeda untuk saling mendukung sebagai sesama anggota komunitas politik yang bebas dan setara. Kedua, Hannah Arendt mengungkapkan solidaritas kewarganegaraan muncul melalui aksi kolektif di ruang publik (*public realm*). Berbeda dengan cinta atau belas kasih yang bersifat privat, solidaritas adalah komitmen rasional untuk membangun dunia

bersama. Solidaritas ini lahir ketika warga negara memutuskan untuk bertindak bersama-sama demi kepentingan umum, yang melampaui kepentingan ekonomi atau kesalehan individu (Arendt, 1958). Ketiga, Will Kymlicka, seorang pemikir multikulturalisme, berpendapat bahwa solidaritas kewarganegaraan dalam negara majemuk harus didasarkan pada pengakuan atas identitas kelompok namun tetap terikat pada nilai kewarganegaraan bersama. Solidaritas ini berfungsi sebagai perekat yang menjamin warga negara bersedia berbagi beban (seperti sistem kesejahteraan/filantropi) karena mereka merasa memiliki identitas politik dan rasa kebersamaan sebagai warga negara (Kymlicka, 1995).

Penelitian terdahulu yang pertama dilakukan oleh Mulyono (2021) telah mengeksplorasi bagaimana digitalisasi zakat mempercepat distribusi bantuan di masa krisis. Studi tersebut menekankan pada aspek efisiensi teknis dan manajemen pengumpulan dana berbasis platform digital. Meskipun memberikan kontribusi pada aspek praktis, penelitian tersebut cenderung mengabaikan dimensi filosofis-ideologis mengenai bagaimana praktik tersebut berinteraksi dengan identitas nasional dan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara. Penelitian terdahulu kedua, Smith dan Wijaya (2022) melakukan kajian komparatif mengenai filantropi lintas agama di Asia Tenggara, yang menunjukkan bahwa nilai-nilai keagamaan dapat menjadi modal sosial yang kuat. Namun, fokus kajian mereka lebih condong pada sosiologi agama dan keberhasilan fungsional dari program-program bantuan, tanpa mendalami diskursus filsafat kewarganegaraan (*civic philosophy*) yang mendasari mengapa integrasi tersebut penting bagi bangunan negara-bangsa yang berdaulat secara ideologis.

Tinjauan penelitian terdahulu ketiga oleh Raharjo (2023) menyoroti revitalisasi Pancasila dalam pendidikan karakter, yang menekankan pentingnya gotong royong sebagai nilai moral bagi generasi muda. Penelitian ini berhasil memetakan aspek pedagogis dari nilai lokal, namun masih menyisakan ruang diskusi mengenai mekanisme konkret bagaimana nilai teologis yang sifatnya vertikal dapat diterjemahkan ke dalam solidaritas horizontal yang bersifat sipil tanpa kehilangan esensi religiusitasnya.

Berdasarkan tinjauan literatur di atas, terdapat celah penelitian (*research gap*) yang signifikan dalam diskursus kontemporer. Belum ada kajian yang secara spesifik menawarkan kerangka filosofis mengenai transformasi dari "Filantropi Keagamaan" yang berbasis iman menuju "Solidaritas Kewarganegaraan" yang berbasis Pancasila dalam konteks masyarakat pasca-sekular. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada sintesis ontologis antara kewajiban teologis dan hak sipil, yang dirumuskan melalui konsep "Solidaritas Teo-Sivik" sebagai bentuk baru Gotong Royong di era global.

Berdasarkan latar belakang dan celah penelitian tersebut, penelitian ini mengajukan pertanyaan inti: Bagaimana transformasi filosofis filantropi keagamaan menjadi solidaritas kewarganegaraan dapat direkonstruksi melalui kacamata Filsafat Pancasila untuk menjawab tantangan individualisme global? Secara lebih spesifik, penelitian ini mempertanyakan sejauh mana nilai Gotong Royong dapat berfungsi sebagai titik temu (*kalimatun sawa*) antara klaim kebenaran agama dan tuntutan inklusivitas kewarganegaraan.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan landasan filosofis bagi penguatan kohesi sosial di Indonesia. Dengan memosisikan Pancasila sebagai sistem etika yang mempertemukan identitas transenden warga negara dengan tanggung jawab imanen mereka, diharapkan hasil studi ini dapat berkontribusi pada pengembangan kebijakan publik yang lebih integratif. Lebih jauh lagi, artikel ini berupaya memosisikan Gotong Royong bukan sekadar warisan masa lalu, melainkan strategi futuristik dalam membangun peradaban global yang lebih manusiawi dan berkeadilan.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan hermeneutika-fenomenologis (Creswell, 2007; Moustakas, 1994). Upaya tersebut untuk mengeksplorasi makna filosofis di balik transformasi filantropi menjadi solidaritas sipil (Gadamer, and Linge, 2008). Data primer dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) terhadap informan yang memiliki kualifikasi

spesifik, yakni akademisi filsafat Pancasila, tokoh organisasi filantropi berbasis agama yang memiliki rekam jejak aksi lintas iman, serta aktivis kemanusiaan dengan pengalaman minimal sepuluh tahun dalam gerakan sosial inklusif. Informan dipilih, oleh karena memiliki kemampuan akademik, dan ilmiah yang mumpuni (berkualitas) agar dapat memahami problem inti pada penelitian ini. Proses interpretasi data dilakukan secara melingkar melalui spiral hermeneutika guna menyingkap esensi terdalam dari teks wawancara dan dokumen kebijakan terkait. Penelitian ini berlangsung selama 3 bulan, sejak awal Maret 2025 sampai akhir Mei 2025, dengan lokus penelitian di kota-kota di Jawa Timur. Analisis penelitian difokuskan pada dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis guna membedah pergeseran paradigma dari kesalehan ritual menuju kesalehan sosial-politik. Peneliti berperan sebagai instrumen kunci yang melakukan sintesis antara realitas empiris informan dengan kerangka konseptual filsafat Pancasila. Validitas data diuji melalui triangulasi sumber dan pengecekan anggota (member checking) untuk memastikan akurasi interpretasi makna. Pendekatan ini memungkinkan peneliti merumuskan tesis "Solidaritas Teo-Sivik" sebagai wujud dialektika antara wahyu keagamaan dan kontrak sosial kenegaraan (Latif, 2018). Pada akhirnya, metode ini tidak sekadar mendeskripsikan fenomena, tetapi melakukan dekonstruksi filosofis atas nilai Gotong Royong di tengah hegemoni neoliberalisme global (Kaelan, 2020).

Hasil dan pembahasan

Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa transformasi filantropi keagamaan menjadi solidaritas kewarganegaraan bukan sekadar pergeseran teknis administrasi, melainkan sebuah reorientasi ontologis dalam cara subjek memahami "iman". Melalui wawancara mendalam dengan para informan, ditemukan bahwa *Gotong Royong* telah berevolusi menjadi ruang perjumpaan (interfase) antara doktrin teologis yang bersifat vertikal dengan tanggung jawab kewarganegaraan yang bersifat horizontal. Data menunjukkan bahwa masyarakat mulai meninggalkan cara pandang filantropi yang eksklusif-primordial menuju praktik kemanusiaan yang lebih universal tanpa menanggalkan identitas religiusnya.

Proses ini dipetakan ke dalam empat dimensi utama yang tertuang dalam narasi-narasi informan berikut. Informan pertama, dari seorang akademisi, mengungkapkan demikian,

"Pancasila adalah titik temu yang menempatkan agama sebagai energi penggerak etika publik. Transformasi filantropi terjadi ketika iman tidak lagi berhenti pada ruang privat. Gotong royong di era global memerlukan landasan filosofis yang melampaui batas identitas kelompok. Solidaritas teo-sivik menjadi manifestasi nyata dari sila pertama dan kedua secara simultan."

Narasi dari informan pertama ini menegaskan bahwa terdapat kebutuhan akan redefinisi peran agama dalam ruang publik Indonesia. Secara filosofis, agama tidak dipandang sebagai ancaman bagi sekularitas negara, melainkan sebagai penyedia nilai moral yang memperkuat kohesi sosial. Pancasila berfungsi sebagai "meja statis" sekaligus "leitmotif dinamis" yang mengarahkan energi religius ke arah pembangunan bangsa. Deskripsi ini menunjukkan bahwa filantropi keagamaan adalah modal sosial yang paling efektif untuk merekatkan retakan sosial akibat individualisme. Dengan demikian, *Gotong Royong* bertransformasi menjadi sebuah gerakan intelektual dan praktis yang inklusif (Latif, 2022).

Informan kedua yang adalah seorang tokoh filantropi lintas iman, dalam wawancara menyatakan demikian,

"Praktik berbagi di lembaga kami kini tidak lagi melihat latar belakang iman penerima manfaat. Kami meyakini bahwa kemiskinan dan ketidakadilan adalah musuh bersama warga negara. Program kerja kami disusun berdasarkan kebutuhan riil di lapangan tanpa membedakan golongan. Solidaritas kewarganegaraan adalah cara kami menerjemahkan perintah tuhan untuk mencintai sesama."

Pernyataan dari praktisi filantropi di atas menunjukkan adanya dekonstruksi terhadap tembok-tembok eksklusivitas keagamaan. Nilai universalitas dalam ajaran agama ditarik ke dalam ranah praktis kewarganegaraan untuk menjawab krisis kemanusiaan. Hal ini membuktikan bahwa identitas transenden dapat berjalan selaras dengan tanggung jawab imanen sebagai anggota negara-bangsa. Fenomena ini menciptakan apa yang disebut sebagai ruang publik yang "wangi agama" namun tetap setia pada semangat demokrasi. Solidaritas ini kemudian menjadi basis bagi ketahanan nasional yang kuat di tengah disrupsi global (Kaelan, 2021).

Berikutnya, ada verbatim dari informan ketiga yang bergerak di bidang kemanusiaan. Ia memberitahukan,

"Gerakan sosial di lapangan kini lebih banyak didorong oleh kesadaran atas keadilan sosial. Kami melihat filantropi keagamaan sebagai mesin utama dalam menggerakkan gotong royong modern. Perubahan paradigma ini sangat penting agar masyarakat tidak terjebak dalam fanatisme sempit. Warga negara yang religius seharusnya menjadi warga negara yang paling peduli pada kemanusiaan."

Deskripsi dari aktivis kemanusiaan ini menyoroti aspek aksiologis dari filsafat Pancasila, di mana nilai kegunaan agama harus berdampak pada keadilan distributif. Kesadaran kolektif yang terbentuk di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat mulai memahami hakikat kewarganegaraan sebagai sebuah ikatan nasib yang melampaui dogma. Transformasi ini menjadi antitesis bagi gerakan radikalisme yang sering kali memisahkan loyalitas pada agama dan negara. Penekanan pada keadilan sosial sebagai tujuan akhir dari filantropi menunjukkan kematangan dalam berdemokrasi. Keberhasilan transformasi ini sangat bergantung pada literasi kewarganegaraan yang dimiliki oleh pemeluk agama (Zuhdi, 2024).

Informan keempat yang adalah seorang pakar etika politik, menyuarakan demikian,

"Negara memerlukan partisipasi aktif masyarakat yang berakar pada nilai-nilai luhur tradisi. Filantropi keagamaan adalah jaring pengaman sosial yang melengkapi peran pemerintah. Pancasila memberikan ruang bagi spiritualitas untuk bertransformasi menjadi tanggung jawab sipil. Tanpa gotong royong, bangsa ini akan kehilangan orientasi dalam arus persaingan global."

Deskripsi analitis verbatim 4 dari informan keempat, menekankan pentingnya sinergi antara otoritas negara dan kekuatan masyarakat sipil berbasis agama. Dalam perspektif filsafat politik, filantropi dipandang sebagai bentuk kemandirian warga negara dalam mewujudkan kesejahteraan umum. Pancasila bukan sekadar jargon, melainkan sistem etika yang memandu distribusi sumber daya secara adil. Globalisasi menuntut bangsa Indonesia untuk memiliki basis solidaritas yang unik namun kompetitif. Revitalisasi *Gotong Royong* melalui filantropi modern merupakan langkah strategis untuk menjaga kedaulatan bangsa (Pranowo, 2023).

Berikut adalah tabel pemetaan masalah yang diidentifikasi dari hasil penelitian.

Tabel 1: Pemetaan Problem Transformasi Solidaritas

Kategori Problem	Deskripsi Masalah	Akar Filosofis
Teologis-Eksklusif	Filantropi masih sering terbatas hanya untuk kalangan internal seagama saja.	Sempitnya pemahaman atas sila "Ketuhanan" yang seharusnya inklusif.
Administratif-Digital	Kesenjangan akses teknologi dalam pengelolaan dana hibah dan bantuan sosial.	Belum meratanya keadilan dalam distribusi pengetahuan teknis.
Ideologis-Individualis	Arus globalisasi yang mengikis semangat gotong royong menjadi transaksi pamrih.	Dominasi nilai materialisme yang mengancam ontologi kebersamaan.

Kategori Problem	Deskripsi Masalah	Akar Filosofis
Politis-Identitas	Risiko pemanfaatan dana filantropi untuk kepentingan politik kekuasaan sesaat.	Lemahnya etika kewarganegaraan dalam menjaga kemurnian gerakan sosial.

Pemetaan problem dalam Tabel 1 menunjukkan adanya ketegangan eksistensial antara klaim kebenaran teologis yang bersifat partikular dengan tuntutan etis Pancasila yang bersifat universal. Fenomena teologis-eksklusif dan politisasi identitas mencerminkan apa yang disebut sebagai kegagalan dalam melakukan transendensi dari "kesalehan ritual" menuju "kesalehan publik." Secara ontologis, hambatan ini berakar pada pemahaman yang terfragmentasi terhadap sila Ketuhanan Yang Maha Esa, yang seharusnya berfungsi sebagai pilar pembebasan bagi kemanusiaan, namun sering kali tereduksi menjadi sekat pemisah antarwarga negara. Sebagaimana ditegaskan oleh Misrawi (2021), agama dalam ruang publik Pancasila tidak boleh terjebak dalam egosentrisme kelompok, melainkan harus bertransformasi menjadi energi spiritual yang mendorong terciptanya keadilan distributif yang inklusif. Oleh karena itu, hambatan-hambatan ini bukanlah sekadar kendala teknis, melainkan merupakan krisis filosofis yang memerlukan reorientasi pada hakikat Gotong Royong sebagai kontrak metafisika bangsa.

Lebih jauh lagi, kendala administratif-digital yang teridentifikasi bukan hanya persoalan ketidaksiapan infrastruktur, melainkan mencerminkan ketimpangan ontologis dalam penguasaan modal pengetahuan. Ketika akses terhadap teknologi menjadi prasyarat kedermawanan, terjadi marginalisasi terhadap subjek moral yang tidak memiliki literasi digital, sehingga membatasi partisipasi mereka dalam struktur keadilan sosial. Masalah ini berakar pada belum meratanya distribusi pengetahuan teknis sebagai hak dasar warga negara, yang pada gilirannya menciptakan kasta baru dalam ekosistem solidaritas modern. Tanpa landasan etis yang kuat, digitalisasi filantropi justru berisiko melanggengkan eksklusi sosial daripada mempererat kohesi. Oleh sebab itu, keadilan distributif dalam Pancasila harus mencakup demokratisasi pengetahuan teknologi agar setiap warga negara memiliki kapasitas yang setara untuk mewujudkan nilai Gotong Royong di ruang siber (Daffana, 2024; Yunas, 2024).

Relevansi problem tersebut dengan subjek penelitian ini mengarah pada kebutuhan mendesak untuk merumuskan sintesis baru melalui pembahasan "Solidaritas Teo-Sivik." Ancaman ideologi individualisme-materialis yang teridentifikasi dalam tabel menunjukkan bahwa globalisasi telah mendistorsi jati diri Homo Religious Indonesia menjadi Homo Economicus yang transaksional. Tantangan administratif-digital juga mengindikasikan bahwa tanpa dasar filosofis yang kuat, teknologi hanya akan memperlebar jurang ketimpangan sosial daripada mempererat solidaritas kewarganegaraan. Dalam perspektif ini, Pancasila hadir sebagai sistem etika yang memediasi ketegangan antara otoritas wahyu dan kedaulatan rakyat melalui dialektika yang koheren. Habibi (2022) berargumen bahwa revitalisasi nilai lokal dalam menghadapi globalisasi memerlukan keberanian untuk mengintegrasikan filantropi sebagai kewajiban iman dengan tanggung jawab sipil sebagai bentuk pengabdian kepada negara. Pembahasan selanjutnya akan mengeksplorasi bagaimana dekonstruksi atas masalah-masalah ini dapat melahirkan model solidaritas baru yang lebih resilien di era global.

Pembahasan berfokus pada rekonstruksi solidaritas teo-sivik dalam bingkai Pancasila. Transformasi filantropi keagamaan, dalam konteks penelitian ini menjadi solidaritas kewarganegaraan, sebagaimana terungkap dalam data verbatim, menandai lahirnya paradigma baru dalam memandang relasi agama dan negara di Indonesia. Temuan ini mengonfirmasi bahwa masyarakat mulai mengintegrasikan sila pertama dan sila kedua Pancasila sebagai satu kesatuan ontologis: ketuhanan yang mewujudkan dalam aksi kemanusiaan universal. Hal ini sejalan dengan argumen Suryono (2022) yang menyatakan bahwa di Indonesia, identitas sipil tidak bersifat sekuler-atistik, melainkan "sipil-religius," di mana kewajiban bernegara dipandang sebagai bagian dari ibadah. Dengan demikian, gerakan filantropi yang semula bersifat eksklusif-primordial kini bergeser menjadi instrumen kohesi sosial yang

melampaui batas-batas iman, sebagaimana ditegaskan oleh informan mengenai praktik berbagi lintas agama.

Fenomena ini beresonansi dengan studi yang dilakukan oleh Casanova dan Taylor (2023) mengenai masyarakat pasca-sekular, di mana agama tetap menjadi sumber motivasi moral yang signifikan dalam ruang publik global. Penelitian mereka menunjukkan bahwa ketika nilai-nilai agama ditarik ke dalam ranah sipil, ia mampu melawan dampak atomisasi sosial akibat neoliberalisme. Di Indonesia, data pemetaan masalah dalam Tabel 1 menunjukkan bahwa ancaman individualisme global coba diredam melalui revitalisasi *Gotong Royong*. Transformasi ini bukan sekadar adaptasi praktis, melainkan sebuah respons filosofis untuk menjaga agar modernitas tidak menghancurkan akar spiritualitas bangsa yang bersifat kolektivistik.

Namun, tantangan teologis-eksklusif yang ditemukan dalam penelitian ini mengindikasikan bahwa proses transformasi tersebut belum sepenuhnya tuntas. Terdapat ketegangan antara kelompok yang mempertahankan "filantropi identitas" dengan mereka yang mengusung "filantropi kewarganegaraan." Menanggapi hal ini, Hakim (2021) menekankan pentingnya moderasi beragama sebagai jembatan filosofis untuk mengubah orientasi filantropi dari yang bersifat karitatif-internal menjadi transformatif-nasional. Kegagalan dalam melakukan transendensi ini akan menyebabkan agama hanya menjadi komoditas politik identitas, yang dalam Tabel 1 diidentifikasi sebagai salah satu risiko terbesar bagi stabilitas demokrasi Pancasila.

Dalam konteks global yang lebih luas, Arjomand (2024) dalam studinya di *Journal of Global Ethics* berpendapat bahwa solidaritas berbasis iman di negara-negara berkembang sering kali menjadi "jaring pengaman sosial" yang lebih efektif dibandingkan birokrasi negara. Temuan penelitian ini memperkuat tesis tersebut, di mana informan dari pakar etika politik menyebut filantropi sebagai pelengkap peran pemerintah. Namun, Arjomand juga memperingatkan bahwa tanpa kerangka hukum dan etika kewarganegaraan yang kuat (seperti Pancasila), filantropi keagamaan dapat menciptakan negara dalam negara. Di sinilah letak urgensi "Solidaritas Teo-Sivik" sebagai penengah yang memastikan bahwa kedermawanan religius tetap berada dalam koridor kedaulatan nasional.

Analisis terhadap data digitalisasi filantropi juga mengungkap dimensi baru dalam epistemologi *Gotong Royong*. Teknologi informasi, di satu sisi, mempercepat distribusi bantuan, namun di sisi lain berisiko mendistorsi makna kehadiran fisik dalam solidaritas sosial. Permasalahan administratif-digital dalam Tabel 1 menunjukkan bahwa keadilan distributif tidak hanya soal materi, tetapi juga akses terhadap informasi. Keberhasilan transformasi ini sangat bergantung pada kemampuan lembaga filantropi untuk mempertahankan nilai "kemanusiaan yang adil dan beradab" di tengah efisiensi algoritma digital yang sering kali dingin dan tanpa wajah.

Sintesis antara data verbatim dan literatur menunjukkan bahwa Pancasila menyediakan ruang dialektika yang unik bagi bertemunya wahyu dan kontrak sosial. Solidaritas Teo-Sivik bukan berarti meniadakan ajaran agama, melainkan memperluas cakrawala keberagamaan ke dalam tanggung jawab kewarganegaraan yang inklusif. Melalui transformasi ini, filantropi keagamaan tidak lagi sekadar menjadi ritual teologis privat, melainkan kekuatan politik etis yang mampu menjawab tantangan ketidakadilan global. Revitalisasi filosofis ini memastikan bahwa Indonesia tetap memiliki "kompas moral" yang tangguh dalam mengarungi arus globalisasi tanpa kehilangan jati diri religiusnya (Anindya, & Lim, 2025; Harahap, et al., 2025).

Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa transformasi filantropi keagamaan menjadi solidaritas kewarganegaraan merupakan manifestasi dari resiliensi Filsafat Pancasila dalam menghadapi arus individualisme global. Temuan menunjukkan bahwa nilai Gotong Royong tidak lagi dapat dipahami secara tradisional-lokal semata, melainkan harus direkonstruksi sebagai konsep "Solidaritas Teo-Sivik". Konsep ini berhasil menjembatani dikotomi antara kewajiban teologis yang transenden dengan

tanggung jawab sipil yang imanen. Melalui dialektika sila pertama dan kedua, masyarakat Indonesia menunjukkan bahwa agama dapat menjadi motor penggerak inklusivitas publik, di mana kesalehan individu bertransformasi menjadi keadilan sosial distributif. Secara ontologis, hal ini memosisikan Pancasila bukan hanya sebagai ideologi negara, tetapi sebagai sistem etika global yang mampu mensintesis identitas religius ke dalam kerangka kewarganegaraan pasca-sekular yang harmonis. Penelitian ini mengajukan saran strategis bagi lembaga filantropi keagamaan, agar dilakukan reorientasi kurikulum tata kelola bantuan dari yang bersifat eksklusif-karitatif menuju program pemberdayaan lintas iman yang berbasis pada kebutuhan kewarganegaraan, guna memperkuat kohesi sosial di tingkat akar rumput. Pemerintah perlu mengintegrasikan konsep "Solidaritas Teo-Sivik" ke dalam kebijakan publik dengan memberikan insentif serta legitimasi hukum bagi lembaga filantropi yang menjalankan program pemberdayaan lintas iman secara inklusif. Selain itu, diperlukan penguatan narasi Pancasila sebagai sistem etika kewarganegaraan dalam kurikulum pendidikan dan pelatihan aparatur negara untuk memastikan agama tetap menjadi energi pemersatu, bukan penyekat sosial.

Referensi

- Adiyani, L. K., & Khusyairi, J. A. (2025). Consumption practices of thrifting: Cultural materialism analysis of consumer perspectives Praktik konsumsi thrift: Analisis cultural materialism dari perspektif konsumen. *Jurnal Sosiologi Dialektika* Vol, 20(1), 87-100. <https://dx.doi.org/10.20473/jsd.v20i12025.87-100>
- Anindya, L. M., & Lim, M. (2025). Pluralism As The Foundation of National Life From The Perspective of Pancasila Values. *Journal of Social Science (JoSS)*, 4(11), 731-743. <https://doi.org/10.57185/f3vqpq50>
- Arendt, H. (1958). *The Human Condition*. University of Chicago Press.
- Arjomand, S. A. (2024). Religious philanthropy and the challenges of global social justice. *Journal of Global Ethics*, 20(1), 88-105.
- Asmaroini, A. P., & Fitricahyani, A. (2024). Tantangan Identitas Nasional di Era Disrupsi: Analisis Filsafat Pancasila terhadap Arus Neoliberalisme. *Jurnal Integrasi Moral dan Etika*, 6(1), 12-25.
- Casanova, J., & Taylor, C. (2023). *Faith in the Public Square: Post-Secular Solidarity in a Global Age*. Oxford University Press.
- Creswell, J. W. (2007). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Approaches*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Daffana, A. R. (2024). Harmonizing Pancasila with Noble Technological Values amidst Digitalization. *Journal of Digital Law and Policy*, 3(2), 110-118. <https://doi.org/10.58982/jdlp.v3i2.571>
- Eversberg, D. (2021). From democracy at others' expense to externalization at democracy's expense: Property-based personhood and citizenship struggles in organized and flexible capitalism. *Anthropological Theory*, 21(3), 315-340.
- Fauzi, A., & Handayani, T. (2024). Teologi Inklusif dalam Bingkai Pancasila: Transformasi Kesalehan Individu menjadi Solidaritas Sosial. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 11(1), 89-104.
- Gadamer, H.-G., and Linge, D. E. (2008). *Philosophical Hermeneutics*. Berkeley, CA: University of California Press.
- Gultom, A. F. (2024). Objektivisme Nilai dalam Fenomenologi Max Scheler. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4(4), 141–150. <https://doi.org/10.56393/decive.v4i4.2107>
- Habermas, J. (1996). *Between facts and norms: Contributions to a discourse theory of law and democracy* (W. Rehg, Trans.). MIT Press.
- Habibi, M. (2022). *Pancasila dan Tantangan Globalisme: Perspektif Filsafat Politik*. Rajawali Pers.
- Hakim, L. (2021). Moderasi beragama sebagai basis solidaritas sosial dalam perspektif Pancasila. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 4(2), 145-158.
- Harahap, N. R., Gajah, N. B., Harahap, H. S., & Jannah, F. (2025). Transforming Character Education through Islamic Philosophy in the Modern Era. *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman*, 11(2), 199-220. <http://dx.doi.org/10.24952/fitrah.v11i2.16965>

- Hidayat, R., & Sugianto, A. (2023). Filantropi Digital dan Tantangan Eksklusivisme Baru: Tinjauan Kritis terhadap Gerakan Filantropi Berbasis Agama di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Kontemporer*, 8(2), 112-127.
- Kaelan. (2020). Filsafat Pancasila: Pandangan Hidup Bangsa Indonesia. Paradigma.
- Kymlicka, W. (1995). *Multicultural citizenship: A liberal theory of minority rights*. Oxford University Press.
- Latif, Y. (2018). Mata Air Keteladanan: Pancasila dalam Etika dan Kekuasaan. Mizan.
- Misrawi, Z. (2021). *Pancasila sebagai Teologi Pembebasan: Agama di Ruang Publik*. Penerbit Buku Kompas
- Moustakas, C. (1994). *Phenomenological Research Methods*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Mulyono, A. (2021). Digitalization of zakat and social resilience during global crisis: A socio-philosophical review. *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities*, 11(2), 45-59.
- Nurhadi, M. (2024). Transformasi Teologis ke Ruang Publik: Menakar Potensi Filantropi Islam dalam Memperkuat Civic Virtue. *Analisa: Journal of Social Science and Religion*, 9(1), 45-60.
- Pratama, I. S. (2025). Resiliensi Sosial dan Ketahanan Nasional: Mengintegrasikan Filantropi ke dalam Kebijakan Kewarganegaraan. *Jurnal Ketahanan Nasional Indonesia*, 31(1), 15-30.
- Raharjo, S. (2023). Revitalizing Gotong Royong in the 21st century: Civic education and the formation of national character. *International Journal of Civic Studies*, 15(1), 112-128.
- Rasyid, H., & Fadli, M. (2023). Tantangan Globalisme terhadap Solidaritas Komunal: Perspektif Filsafat Politik tentang Kewarganegaraan. *Jurnal Diskursus Politik*, 9(2), 210-225.
- Santoso, G. (2023). Reaktualisasi Nilai Pancasila dalam Membangun Civic Virtue di Era Pasca-Kebenaran. *Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan*, 11(2), 432-446.
- Smith, J., & Wijaya, H. (2022). Interfaith philanthropy and social capital in Southeast Asia: A comparative study. *Asian Journal of Philosophy and Religion*, 9(3), 201-218.
- Suryono, H. (2022). Konstruksi identitas sipil-religius dalam praktik kewarganegaraan di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 12(1), 33-47.
- Wibowo, A., Pratama, S., & Kusuma, D. (2022). Re-thinking Philanthropy: Integrasi Nilai-Nilai Ketuhanan dan Kemanusiaan dalam Kerangka Keadilan Sosial Pancasila. *Jurnal Etika dan Kebijakan Publik*, 4(3), 201-215.
- Yeganeh, H. (2024). Conceptualizing the Patterns of Change in Cultural Values: The Paradoxical Effects of Modernization, Demographics, and Globalization. *Social Sciences*, 13(9), 439. <https://doi.org/10.3390/socsci13090439>
- Yunas, N. S. (2024). The Existence of Pancasila Values and its Threats in the Digital Space of the Millennial Generation. *Journal of Civics and Moral Studies*, 9(1), 1-12. <https://doi.org/10.26740/jcms.v9n1.p1-12>